

**MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG
(1996-1999)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Oleh:

HERRY ANDRII KISWANTO

F061191044

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat penugasan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Nomor 699/UN 4 9/KEP/2023

Tanggal 17 Mei 2023

Nama Mahasiswa Herry Andrii Kiswanto


NIM F061191044


Menyetujui skripsi ini, untuk diteruskan kepada Tim Penguji di Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 November 2023


Pembimbing I

Pembimbing II


Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D.
NIP. 197410162003121001


Andi Lili Evita, S.S., M. Hum.
NIP. 199001112019032017

Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi
Dekan
u.b. Ketua Departemen Ilmu Sejarah


Dr. Ilham, S.S., M.Hum.
NIP. 19760827 200801 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG

(1996-1999)

Disusun dan diajukan oleh:

HERRY ANDRI KISWANTO


F061191044


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 12 Desember 2023 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Konsultan I

Konsultan II



Amrullah Amir, S.S., M.A., Ph.D.
NIP. 197410162003121001



Andi Lili Evita, S.S., M. Hum.
NIP. 199001112019032017

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010


Dr. Ilham, S.S., M.Hum
NIP. 19760827 200801 1 001

**HALAMAN PENERIMAAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Pada hari Selasa, 12 Desember 2023, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:







MILITER DAN GERAKAN REFORMASI DI UJUNG PANDANG

(1996-1999)

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Desember 2023

PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------|---|---|
| 1. Amrullah Amir, S.S., M.A.Ph.D. | Ketua | : |  |
| 2. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Ilham, S.S., M.Hum. | Penguji I | : |  |
| 4. Nasihin, S.S., M.A. | Penguji II | : |  |
| 5. Amrullah Amir, S.S., M.A.Ph.D. | Konsultan I | : |  |
| 6. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Konsultan II | : |  |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herry Andrii Kiswanto
NIM : F061191044
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas-Universitas : Ilmu Budaya-Universitas Hasanuddin
Judul Skripsi : Militer dan Gerakan Reformasi di Ujung Pandang
(1996-1999)

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan melalui penelitian adalah hasil karya saya sendiri.

Makassar, 12 Desember 2023



Herry Andrii Kiswanto

KATA PENGANTAR

“Akhirnya semua akan tiba...Pada suatu ketika yang telah lama kita ketahui.”
(Soe: 1969).

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Segala puji syukur penulis kirimkan kepada Allah SWT, sebagai maha suci dan maha penyayang kepada segenap hambanya. Penulis tidak akan mampu menemukan segala hal yang baik tanpa belas kasih dan petunjuk-Nya.

Penulisan skripsi ini menjadi babak yang paling melelahkan sepanjang pengalaman penulis dalam menjalani status sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Akan tetapi, seperti penggalan puisi yang ditulis oleh Soe Hok Gie di atas, pada akhirnya semua akan tiba jua.

Penulis mampu menyelesaikan studi dan tugas akhir ini juga karena usaha, bantuan, dan doa dari banyak orang. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan sayang yang teramat tulus kepada:

1. Ibu penulis, **Hj. Reni Tajuddin** yang selalu mengirimkan doa dan cintanya kepada anak laki-lakinya ini. Ayah penulis, **Ramli Syahrani**, atas segala hal baik yang telah diberikan selama ini;
2. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak **Prof. Jamaluddin Jompa, M.Sc**;
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Bapak **Prof. Dr. Akin Duli, M.A.**;
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak **Amrullah Amir S.S., M.A., Ph.D.** dan Ibu **Andi Lili Evita, S.S., M.Hum**, telah membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
5. Ketua Departemen Ilmu Sejarah Bapak **Dr. Ilham, S.S., M.Hum.**;
6. Dosen-dosen Departemen Ilmu Sejarah yang telah mengajar dan memberikan ilmu selama masa studi penulis: Bapak **Dr. Suriadi Mappangara, M. Hum.**; Bapak **Dr. Bambang Sulistyio Edy Purwanto, M.S.**; Ibu **Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum.**; Bapak **Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M. Hum.**; Bapak **Dr. Muslimin AR. Effendy,**

- M.A.; Ibu **Dr. Nahdia Nur, M.Hum.**; Bapak **Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag.**; Bapak **Nasihin, S.S., M.A.**; Alm. Bapak **Prof. Dr. A. Abd. Rasyid Asba, M.A.**; mendiang Ibu **Margriet Lapia Moka, S.S., M.S.**; dan terkhusus kepada Bapak **Drs. Dias Pradadimara, M.A., M.S.** yang menjadi tempat penulis banyak berdiskusi secara menyenangkan, baik mengenai penelitian skripsi ini maupun hal-hal lain;
7. Bapak **Ujddi Usman Pati, S.Sos**, telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi di Departemen Ilmu Sejarah;
 8. Bapak **Dr. Andi Muhammad Akhmar, M.Hum.** Dosen FIB Unhas;
 9. Bapak **Prof. Dr. H. Amran Razak, SE, M.Sc.** Beliau menjadi pembuka keran dan penghubung penulis kepada banyak sumber sejarah, khususnya pelaku-pelaku sejarah yang menjadi informan dalam penelitian ini;
 10. Bunda **Rati Purnamasari**, Bunda **Riri Agustina**, Kakak **A. Utari Astarina**, dan Etta **A. Canggih Appe**, menjadi orang yang selalu memberikan bantuan materi dan limpahan rezeki selama penulis menjadi mahasiswa;
 11. Adik-adik penulis, **Sheren Huriyah Badriah** dan **Safa Hijriah**. Gadis-gadis jelita dengan masa depan yang menarik;
 12. Kakak **Andi Setiawan Toba, S.H.** yang menyediakan tempat tinggal begitu nyaman selama penulis menempuh masa studi di Kota Makassar;
 13. Teman-teman Ilmu Sejarah angkatan 2019, khususnya: **Amadeus El Shaday, Baso Mappangara, Candra Wijaya, Erwin Saputra, Fitriah Nur Akbar, Muhammad Amin, Muhammad Arif Zul Adli, Muhammad Arjun Saputra, Muhammad Rifqi Taufiqurrahman, Muhammad Rijal, Nur Halisa**, dan **Selvi Antarini**. Mereka menjadi orang-orang pembawa kesenangan ketika penulis mulai lelah dengan kejenuhan;
 14. Teman-teman KKNT Ang.108. Posko 5 Bontocani, Kabupaten Bone;
 15. Narasumber-narasumber dalam penelitian ini, khususnya Bapak **Akbar Endra**, Bapak **Ostaf Al Mustafa**, Bapak **Dahlan Usman**, Bapak **Maqbul Halim**, dan Bapak **Hasbi Lodang**;

16. **Mas Duta, Mas Eross, Mas Adam, Mas Sakti, Mas Anton, dan Mas Brian.** Karya-karya kalian menjadi *Sahabat Sejati* penulis selama penelitian skripsi ini;
17. Semua orang yang tidak sempat penulis sebutkan di atas. Doa tulus kepada kalian atas segala kebaikan yang berarti dan diberikan secara cuma-cuma kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Skripsi ini menjadi sesuatu yang amat berarti bagi kehidupan penulis. Satu babak kehidupan yang telah dilewati dengan segala macam lika-likunya, prosesnya, dan pembelajaran lainnya. Penulis mengharapkan hal baik lahir dari karya yang tak sempurna ini, walau sekecil apa pun itu. Sekali lagi, teriring doa dan ucapan terima kasih. *Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 20 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISTILAH	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Tinjauan Pustaka	5
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM GERAKAN MAHASISWA UJUNG PANDANG DEKADE 1990-AN	12
A. Organisasi Intra dan Ekstra Universitas di Ujung Pandang.....	13
1. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT)	14
2. Organisasi Pers Mahasiswa.....	17
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)	19
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	21

5. Serikat Mahasiswa Makassar (SMM)	22
B. Kelompok Diskusi Mahasiswa Ujung Pandang	23
1. Kelompok Diskusi	24
2. Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi (AMPD)	26
BAB III MILITER DAN HUBUNGAN DENGAN GEJOLAK-GEJOLAK	
LOKAL (1996-1997)	30
A. April Makassar Berdarah (AMARAH UMI)	34
B. Pelarangan AMPD oleh Militer	38
C. Gejolak Pemilu 1997 di Kota Ujung Pandang	41
D. Kerusuhan Ujung Pandang September 1997	44
BAB IV DAMPAK PERISTIWA DAN GERAKAN REFORMASI DI	
UJUNG PANDANG (1998-1999)	48
A. Krisis Ekonomi di Ujung Pandang	50
B. Mahasiswa Ujung Pandang Menggugat Sidang Umum MPR 1998	53
C. Isu Penculikan Mahasiswa Unhas	59
D. Hubungan Mahasiswa dan Tentara di Masa Puncak Reformasi	66
E. Tuntutan Reformasi Lokal di Ujung Pandang	72
BAB V KESIMPULAN	77
DAFTAR PUSTAKA	80
INDEKS	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
A. Arsip dan Surat Kabar	90
B. Daftar Narasumber	114
C. List Pertanyaan	116
D. Biodata Penulis	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin	15
Gambar 3.1. Peristiwa AMARAH UMI	36
Gambar 3.2. Kerusuhan Ujung Pandang 1997.....	45
Gambar 4.1. Rapat Akbar Unhas dan Amien Rais	58
Gambar 4.2. Mimbar Bebas Mahasiswa Unhas	62
Gambar 4.3. Unjuk Rasa Mahasiswa Unhas.....	63
Gambar 4.4. Rapat SOLID dengan Pangdam VII/Wirabuana.....	69
Gambar 4.5. Unjuk Rasa Mahasiswa Unhas 20 Mei 1998	70
Gambar 4.6. Rektor Unhas Prof. Radi. A. Gany.....	71
Gambar 4.7. Pendudukan Bandara Mandai oleh SOLID.....	75

DAFTAR ISTILAH

ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
ALDERA	: Aliansi Demokrasi Rakyat
AMPD	: Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
Beredel	: Menghentikan penerbitan pers secara paksa
FDT	: Forum Diskusi Tamalanrea
FDTS	: Front Demonstran Tuanta Salamaka
Gejolak	: Gerakan (pemberontakan dan sebagainya); huru-hara
Goglo	: Simpatisan Golkar yang sering mengacau
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
IKIP	: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Katalisator	: Sesuatu yang mempercepat suatu peristiwa
KKNF	: Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Feodalisme
KODAM	: Komando Daerah Militer
KODIM	: Komando Distrik Militer
Konsolidasi	: Penguatan Kelompok
Konstelasi	: Keadaan, tatanan
Legitimasi	: Pernyataan yang sah
Maperwa	: Majelis Permusyawaratan Mahasiswa
Marinir	: Tentara yang menjadi bagian dari angkatan laut
Mayjen TNI	: Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia
Militeristik	: Bersifat militer
Mimbar Bebas	: Aksi orasi oleh kumpulan mahasiswa
Orde Baru	: Pemerintahan Presiden Soeharto 1968-1998
PAMMI	: Persatuan Aksi Mahasiswa Makassar Indonesia
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Pendudukan	: Perbuatan menduduki suatu daerah dan sebagainya
Persuasif	: Pendekatan yang bersifat membujuk secara halus

PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Polemik	: Perdebatan mengenai suatu masalah
PRD	: Partai Rakyat Demokratik
Reformasi	: Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara
Represif	: Pendekatan yang menindas atau bersifat keras
Revolusi	: Perubahan ketatanegaraan yang dilakukan dengan Kekerasan
Rezim	: Tata pemerintah negara; pemerintahan yang berkuasa
Senat	: Organisasi eksekutif mahasiswa
Sentralistik	: Berorientasi ke pusat (sentral)
SMM	: Serikat Mahasiswa Makassar
SMPT	: Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi
SMUH	: Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin
SOLID Unhas	: Solidaritas Mahasiswa Universitas Hasanuddin
Sospol	: Sosial Politik
UKPM	: Unit Kegiatan Pers Mahasiswa
UMI	: Universitas Muslim Indonesia
UNHAS	: Universitas Hasanuddin

ABSTRAK

Herry Andrii Kiswanto. F061191044. “Militer dan Gerakan Reformasi di Ujung Pandang (1996-1999)”, dibimbing oleh Amrullah Amir, S.S., M.A. Ph.D. dan Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk meneliti sejarah peristiwa reformasi 1998 di Kota Ujung Pandang, khususnya terkait hubungan antara kelompok militer dengan gerakan reformasi di kota ini. Studi ini menggunakan metode sejarah dengan melakukan penelusuran sumber sejarah, di mana arsip surat kabar banyak yang menjadi sumber utamanya. Pelaku-pelaku sejarah reformasi di kota ini turut menjadi sumber kunci penulis. Data-data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis hingga menjadi karya ilmiah sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan gerakan reformasi di Ujung Pandang terbentuk dari kelompok-kelompok mahasiswa yang berada di luar organisasi formal-struktural, di antaranya dari kelompok diskusi, pers kampus, atau aliansi mahasiswa antar kampus. Gejolak-gejolak lokal di Ujung Pandang kemudian memperlihatkan hubungan antara militer dengan bibit gerakan reformasi yang saling bersitegang. Akan tetapi, terjadi perubahan pendekatan militer yang lebih lunak terhadap gerakan reformasi di kota ini. Pergantian pimpinan militer serta desakan yang makin meningkat ke arah reformasi menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendekatan militer yang diambil. Tuntutan reformasi lokal di Kota Ujung Pandang kemudian hadir setelah Orde Baru lengser pada tahun 1998.

Kata kunci: *Gerakan Reformasi, Mahasiswa, Militer, Ujung Pandang.*

ABSTRACT

Herry Andrii Kiswanto. F061191044. “Military and the Reform Movement in Ujung Pandang (1996-1999)”, supervised by Amrullah Amir, S.S., M.A. Ph.D. and Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.

This thesis research aims to examine the history of the events of 1998 in Ujung Pandang City, especially regarding the relationship between military groups and the reform movement in this city. This study uses historical methods by searching historical sources, where many newspaper archives are the main source. The historical actors of reform in this city are also key sources for the author. The data collected is then processed and explained to become a historical scientific work.

The research results show that the reform movement in Ujung Pandang was formed from student groups outside formal-structural organizations, including discussion groups, the campus press, or inter-campus student alliances. The local unrest in Ujung Pandang then showed that the relationship between the military and the seeds of the reform movement were at odds with each other. However, there was a change in the military's softer approach to the reform movement in this city. Changes in military leadership and increasing pressure towards reform are factors that influence the military approach taken. Demands for local reform in Ujung Pandang City emerged after the New Order fell in 1998.

Keywords: Reform Movement, Students, Military, Ujung Pandang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Ujung Pandang menjadi salah satu kota yang merasakan gelombang arus reformasi 1998. Kota yang secara geografis jauh dari pemerintahan pusat di Jakarta ini, termasuk yang mula-mula mengalami pergolakan dari sejarah reformasi. Ujung Pandang adalah nama dahulu dari Kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota ini berganti nama menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971 karena perluasan wilayah.¹

Tanggal 24 April 1996 di Universitas Muslim Indonesia (UMI), universitas swasta terbesar di Ujung Pandang, berlangsung demonstrasi mahasiswa yang menentang kenaikan tarif angkot sekitar 70 persen. Mahasiswa yang disamakan tarif bayarannya dengan masyarakat umum memprotes hal tersebut. Peristiwa tersebut kemudian menjadi ricuh sebab terjadi bentrokan antara aparat dengan mahasiswa. Peristiwa yang dikenal dengan nama AMARAH UMI ini merupakan babak awal dari rangkaian sejarah reformasi di Ujung Pandang. Berbagai peristiwa dan gejolak kemudian terus berlangsung hingga kejatuhan Soeharto di tahun 1998.²

Reformasi menjadi suatu rangkaian kompleks dari sejarah republik ini. Konsep dasar yang menjadi tuntutan reformasi adalah adanya perubahan dari berbagai segi kehidupan terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum.

¹Makassar beberapa kali melakukan pergantian nama. Tanggal 31 Agustus 1971 terjadi pergantian nama kota dari Makassar menjadi Ujung Pandang. Namun di era reformasi, tepatnya tanggal 13 Oktober 1999, kembali diubah menjadi Makassar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999.

²*Jawa Pos*, Kamis, 25 April 1996. "Ujung Pandang Makin Tegang Demo Mahasiswa Lebih Marak" hlm. 5.

Kehidupan yang bernuansa demokratis dengan basis kerakyatan, tidak atas dasar korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi cita-cita reformasi.³

Gerakan reformasi lahir dari gerakan perlawanan yang diinisiasi oleh bermacam-macam kelompok, salah satunya mahasiswa. Gerakan ini mulai bermunculan kembali pada awal dekade 1990-an. Gelombang demokratisasi yang mencuat di berbagai belahan dunia turut menjadi pendorong lahirnya gerakan-gerakan ini.⁴

Dua organisasi di Indonesia yang berakar gerakan mahasiswa tercatat bertransformasi dari gerakan moral ke gerakan politik. Pertama adalah Aliansi Demokrasi Rakyat (ALDERA) yang dideklarasikan pada 26 September 1994 di Bandung. Kedua adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang dideklarasikan pada 22 Juli 1996.⁵

Gerakan perlawanan tersebut juga menemukan tempatnya di Ujung Pandang. Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi atau AMPD menjadi organisasi yang vokal dan kritis di kota ini. AMPD banyak berpartisipasi dalam pembelaan hak-hak rakyat serta menjadi wadah mahasiswa Ujung Pandang dalam partisipasi perjuangan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi di Indonesia.

AMPD turut memainkan peranan yang vital dalam menanggapi isu-isu, baik nasional maupun lokal, dan cukup merepotkan pemerintahan yang berkuasa.

³Oman Sukmana. "Reformasi dan Agenda Politik Indonesia". (*Jurnal Portal Bestari*, 1998), hlm. 94.

⁴Tahun 1989 rezim-rezim komunis di Eropa Timur mengalami keruntuhan, kemudian mencapai klimaksnya saat Uni Soviet dibubarkan pada bulan Desember 1991. Runtuhnya Uni Soviet merupakan kejutan tidak menyenangkan bagi rezim Orde Baru, sebab mereka memandang peristiwa ini sebagai peringatan akan bahaya yang terkandung dari konsesi demokratis oleh pemerintahan Soviet di bawah Mikhael Gorbachev. Baca M. C. Ricklefs. "Sejarah Indonesia Modern 1200-2008", hlm. 624-625.

⁵Teddy Wibisana, et. al. *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), 2022, hlm. 70.

Kelompok ini kemudian menjadi salah satu penggerak berbagai aksi di Ujung Pandang dalam menentang kesewenang-wenangan rezim Orde Baru.

Ujung Pandang juga merupakan markas dari Kodam VII/Wirabuana yang memegang peranan signifikan di Pulau Sulawesi. Institusi militer ini memainkan peranan yang penting dalam menghadapi berbagai gejolak di kota ini. Perlu diketahui bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), khususnya Angkatan Darat, menjadi komponen penting dari rezim ini sejak berkuasa di tahun 1966. Militer mendominasi hampir semua sektor, dari kota hingga ke desa, juga dari masalah pertahanan-keamanan sampai sosial-politik.⁶

Kota Ujung Pandang menunjukkan bagaimana pergolakan di daerah ini terjadi akibat konstelasi politik yang tak menentu dan berubah-ubah, khususnya setelah peristiwa bentrokan antara mahasiswa dan aparat di kampus UMI. Kota ini terus bergerak, dengan situasi dan kondisi yang naik-turun. Intensitas unjuk rasa mahasiswa juga makin hari makin naik akibat isu nasional maupun isu lokal. Mereka lantas dihadapkan dengan penguasa militer setempat yang terus mencari cara untuk merespon situasi yang menghendaki perubahan.

Penulis akan meneliti mengenai sejarah gerakan reformasi di kota Ujung Pandang. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi menjadi perhatian utama, maka penelitian ini tidak hanya berkutat di tahun jatuhnya Presiden Soeharto, sebab gerakan reformasi tidak secara tiba-tiba muncul di tahun 1998.⁷ Penelitian ini juga berfokus pada unsur militer di Ujung Pandang sebagai pintu masuk dalam melihat sejarah reformasi, seperti bagaimana hubungan mereka dengan gerakan reformasi di kota ini.

⁶Pratikno. "Keretakan Otoritarianisme Orde Baru dan Prospek Demokratisasi." (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1998), Vol. 2. No. 2.

⁷Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 2018, hlm. 80.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas mengenai kondisi Ujung Pandang saat menjelang dan terjadinya reformasi 1998. Peranan militer dalam setiap gejolak menyangkut reformasi 1998 juga menjadi titik fokus. Penulis membatasi penelitian dengan dua batasan yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Adanya batasan tersebut bertujuan agar pembahasan dalam penelitian dapat terfokus sehingga apa yang terdapat dalam pertanyaan penelitian dapat terjawab. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

a. Batasan Temporal

Batasan temporal dalam tulisan ini adalah antara tahun 1996-1999. Batasan ini dipilih oleh penulis karena pada tahun 1996 terjadi peristiwa kerusuhan di Ujung Pandang antara mahasiswa UMI dan tentara. Terbunuhnya beberapa mahasiswa lantas membangkitkan semangat perlawanan terhadap rezim. Tahun 1999 dipilih sebagai batasan tahun akhir dari penelitian karena pada tahun tersebut Indonesia berhasil melaksanakan pemilu pertama setelah Orde Baru tumbang dan menjadi penanda era reformasi.

b. Batasan Spasial

Batasan spasial dalam tulisan ini adalah Kota Ujung Pandang. Ujung Pandang merupakan kota yang menjadi tempat bertemunya banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, cendekiawan, dan elemen lainnya yang pada masa reformasi memainkan peranan penting. Markas insittusi militer Kodam VII/Wirabuana juga terdapat di kota ini, sehingga membuat Ujung Pandang begitu ramai dalam gejolak reformasi 1998.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan masalah penelitian yang akan dijawab pada bagian kesimpulan, yaitu mengapa terjadi perubahan pendekatan militer terhadap gerakan reformasi di Ujung Pandang?

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diturunkan beberapa pertanyaan penelitian. Berikut ini adalah pertanyaan penelitian:

- a. Bagaimana proses terbentuknya gerakan reformasi 1998 di Ujung Pandang?
- b. Bagaimana hubungan antara militer dengan gerakan reformasi 1998 di Ujung Pandang?
- c. Apa dampak dari peristiwa dan gerakan reformasi 1998 terhadap masyarakat di Ujung Pandang?

D. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui proses terbentuknya gerakan reformasi 1998 di Ujung Pandang.
- b. Mengetahui hubungan antara militer dengan gerakan reformasi 1998 di Ujung Pandang.
- c. Mengetahui dampak dari peristiwa dan gerakan reformasi 1998 terhadap masyarakat di Ujung Pandang.

E. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan potret mengenai sejarah reformasi 1998 di Ujung Pandang, bagaimana kota ini ketika kemelut reformasi berlangsung.
- b. Menambah khazanah dalam historiografi sejarah reformasi 1998, mengingat peristiwa ini begitu penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini.
- c. Mengingat kembali bahwa reformasi telah berjalan seperempat abad dan apakah nilai-nilai yang diperjuangkan dulu masih konsekuen dijalankan.

F. Tinjauan Pustaka

a. Landasan Konseptual

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, yang berarti orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh. Ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam

peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata (Faisal Salam, 2006;13). Militer menurut Amiroeddin Syarif (1996:I) adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan ketat.

Militer tidak hanya bertugas dalam fungsi pertahanan dan keamanan pada saat Orde Baru berkuasa, akan tetapi mereka juga terlibat dalam urusan-urusan sosial-politik. Konsep dwifungsi ABRI menjadi legitimasi akan hal tersebut. Dwifungsi ABRI menurut Soebijono ialah “suatu konsep politik yang menempatkan ABRI baik sebagai kekuatan Hankam maupun sebagai kekuatan sosial politik dalam supra maupun infra struktur politik sekaligus. Lebih jauh Soebijono mengatakan bahwa Dwifungsi ABRI yaitu sebagai penugasan tentara yang masih aktif dalam tugas non-militer, khususnya dalam lembaga-lembaga pemerintahan baik yang legislatif (DPR/MPR) maupun eksekutif (dari lurah sampai menteri) (Soebijono, 1992:58).⁸

Gerakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau keadaan bergerak (air, laut, mesin). Definisi kedua menurut KBBI adalah pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya). Gerakan yang dimaksud dalam penelitian ini banyak berkaitan dengan definisi dari gerakan sosial. Konsep gerakan sosial merupakan sebuah gerakan yang terbangun berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tujuan untuk melontarkan tuntutan atas perubahan dalam institusi maupun kebijakan dari pemerintah yang dirasa sudah maupun tidak sesuai lagi dengan kehendak sebagian masyarakat. Gerakan sosial menurut Anthony Giddens dalam karya Fadhillah (2006) didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk mencapai

⁸Soebijono, et.al. *Dwifungsi ABRI*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), 1992, hlm. 58.

kepentingan maupun tujuan bersama melalui tindakan kolektif terlepas dari intervensi dari lembaga-lembaga yang mapan.

Reformasi adalah perubahan melalui perundang-undangan, artinya melalui proses legislatif yang konstitusional demokratis. Kata reformasi berasal dari *reformare* (Latin) yang berarti: (1) perbaikan melalui perubahan bentuk atau dengan menghilangkan yang salah; (2) mengakhiri ketidakbaikan dengan menggunakan metode (cara) baru yang baik; (3) pembaruan prosedural-instrumental (non prinsipal).⁹

b. Penelitian yang Relevan

Penulis mendapatkan pelbagai macam literatur, di antaranya adalah buku, skripsi, jurnal, dan artikel yang memiliki kaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Selain itu, dengan mengumpulkan literatur tersebut sehingga penulis mampu melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian penulis.

Buku *Titik Tolak Reformasi: Hari-hari Terakhir Presiden Soeharto* (2000) merupakan bunga rampai sejarah Reformasi 1998. Buku ini merupakan kumpulan esai analisis politik, sosial, dan ekonomi Indonesia sewaktu zaman Orde Baru yang di mana para penulisnya adalah peneliti luar negeri atau indonesianis yang masyhur namanya, di antaranya Edward Aspinall, Herbert Feith, dan Gerry van Klinken. Meskipun terdiri dari berbagai penulis asing dengan fokus tulisan tertentu, akan tetapi tulisan-tulisan itu tetap memiliki benang merah, yaitu bagaimana kondisi Indonesia dalam masa-masa akhir rezim Orde Baru yang diliputi gejolak dan krisis, dimulai dari krisis ekonomi 1997, hingga menyulut ke krisis politik, sosial, dan kekacauan lainnya.

Buku *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru* (1998) merupakan buku yang ditulis oleh Eep Saefulloh Fatah. Buku ini menjelaskan hasil penelitian mengenai hal-hal yang membuat karut marut di era akhir Orde Baru seperti

⁹Oman Sukmana, *Loc. Cit*, hlm. 94.

perkembangan organisasi massa dan partai politik, pemilihan umum di era Orde Baru, peranan politik tentara, serta gejala KKN di rezim Soeharto.

Buku *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto* (2016) yang ditulis oleh Salim Haji Said membahas bagaimana Orde Baru selama berkuasa dan ditopang oleh kekuatan ABRI yang di samping memiliki peranan hankam, juga memiliki peran sosial politik saat Soeharto berkuasa. Buku ini banyak membahas tokoh militer Indonesia dari awal Orde Baru hingga menjelang Reformasi di tahun 1998. Salim Said sebagai peneliti peran politik tentara menjadi rujukan penulis dalam mempelajari dan memahami topik ini karena keterkaitan topik yang kuat.

Buku “...*Bila ABRI Menghendaki*” (1998) merupakan sebuah tulisan hasil penelitian mengenai ABRI di tahun 1996-1997 yang disusun oleh peneliti Dr. Indria Samego. Buku ini menjelaskan tentang problematika dwifungsi ABRI saat masa genting di akhir Orde Baru. Peneliti merumuskan semacam “kredo” bahwa dwifungsi ABRI untuk masa kini dan masa datang tidak bisa tidak perlu direformasi. Berbagai macam faktor menuntut dilakukannya perubahan-perubahan di lingkungan ABRI yang amat berkuasa pada masa Orde Baru.

Buku *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia* (1998) merupakan hasil penelitian dari Anders Uhlin. Buku ini memuat analisis tajam tentang gerakan prodemokrasi Indonesia beserta konteks politiknya sejak masa 1960-an hingga akhir rezim Orde Baru di tahun 1998. Fokus utama analisis terletak pada cara aktor-aktor prodemokrasi Indonesia mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa terkait dengan penegakan demokrasi di luar negeri. Anders Uhlin secara khusus memberikan penekanan pada fenomena menarik yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebagai salah satu wacana pendorong demokratisasi.

Buku *Amuk Makassar* (1998) ditulis oleh Sukriansyah S. Latif dan Tomi Lebang. Buku ini merupakan catatan atas gejolak-gejolak yang pernah terjadi di Ujung Pandang, khususnya mengenai peristiwa kerusuhan 15 September 1997, yaitu penjarahan dan pembakaran terhadap ruko-ruko khususnya milik

warga keturunan Tionghoa. *Amuk Makassar* menjelaskan secara detail peristiwa kerusuhan 15 September 1997, seperti kronologi kejadian dan komentar berbagai pihak atas kejadian tersebut, baik dari tokoh intelektual kampus maupun orang berpengaruh lainnya. Selain peristiwa kerusuhan Makassar 1997, buku ini juga menyinggung kerusuhan yang pernah terjadi di Makassar dan berskala besar, misalnya kekerasan terhadap etnis Tionghoa di Makassar setelah G30S 1965, kemudian peristiwa Toko LA tahun 1980, unjuk rasa anti helm 1987, dan unjuk rasa mahasiswa UMI di tahun 1996.

Skripsi yang ditulis oleh Taqwa Amir Mulkan *Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi (AMPD) dalam Sejarah Gerakan Mahasiswa di Makassar 1994-1998* (2014) merupakan pustaka yang membahas rekam jejak AMPD dalam gerakan mahasiswa di Makassar saat penghujung kekuasaan Orde Baru. Dijelaskan bahwa AMPD memiliki andil yang besar dalam membangun atmosfer gerakan untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Sejak lahir pada tahun 1994, AMPD intens memotori pergerakan mahasiswa di Makassar. Beberapa aksinya membuat repot aparat dan pemerintah daerah, hingga akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang di bulan September 1996.

G. Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima bagian yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber atau verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah.

a. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan langkah awal dalam penulisan sejarah. Dengan ditemukannya topik maka penulis dapat menetapkan batasan spasial dan temporal yang akan diteliti. Topik penelitian ditentukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dan intelektual tersebut dapat mempermudah peneliti dalam penulisan serta memperoleh sumber yang dibutuhkan.

b. Pengumpulan Sumber

Peneliti yang ingin menulis mengenai peristiwa reformasi di tahun 1998, berarti harus mencari sumber-sumber primer ataupun sekunder. Sumber primer adalah sumber yang lahir atau tercipta saat peristiwa tersebut berlangsung, misalnya arsip dokumen, surat kabar sezaman, foto, dan lain-lain. Sumber sekunder mencakup hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, misalnya buku, skripsi, dan jurnal. Surat kabar merupakan sumber primer yang mendominasi sumber yang penulis gunakan, sebab surat kabar pada masa tersebut menjadi media yang laku dan banyak digunakan. Sumber sekunder berupa buku dan skripsi penulis peroleh dari Perpustakaan Umum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya.

c. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahapan dalam menyeleksi manakah data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Proses memilah sumber ini menjadi tahapan yang krusial, sebab membutuhkan objektivitas dan keakuratan dan peneliti. Sumber-sumber yang diperoleh dipilih berdasarkan kegunaannya dalam proses penelitian. Kritik sumber mengenalkan dua tahap penyeleksian, yaitu kritik yaitu kritik eksternal dan kritik internal. Untuk menentukan keaslian data atau sumber maka dapat dilakukan perbandingan sumber yang satu dengan yang lainnya. Kritik eksternal dan internal berfungsi untuk menyaring data dari sumber-sumber yang diperoleh.

d. Interpretasi

Tahapan interpretasi merupakan tahapan di mana penulis melakukan analisis data yang telah diperoleh dari kritik sumber. Melalui interpretasi maka hubungan sebab-akibat antara fakta yang satu dengan yang lainnya dapat terbangun. Melalui tahap interpretasi ini maka akan menghasilkan pandangan yang baru terhadap sejarah tersebut, atau dari sudut pandang yang baru dari penelitian-penelitian terdahulu.

e. Penulisan Sejarah

Penulisan sejarah merupakan puncak atau tahap akhir dalam penelitian sejarah. Pada tahap ini fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dirangkaikan dalam narasi sejarah yang deskriptif dan analitis. Penelitian ini berfokus pada sejarah reformasi di Ujung Pandang, sehingga dalam penulisannya, menyajikan sumber-sumber baik primer ataupun sekunder yang membahas mengenai sejarah Reformasi 1998, khususnya di kota Ujung Pandang.

H. Sistematika Penulisan

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai gambaran umum gerakan mahasiswa Ujung Pandang pada dekade 1990-an awal hingga pertengahan, mulai dari organisasi internal dan eksternal kampus, sampai munculnya kelompok-kelompok lain di luar kelompok formal tersebut. Latar inilah yang membentuk gerakan reformasi di tahun 1998.

Bab III membahas mengenai hubungan antara militer di Ujung Pandang dengan gejolak-gejolak lokal yang berlangsung, yang melibatkan kontak antara militer dan warga sipil, khususnya mahasiswa yang menjadi motor dari gerakan reformasi. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan antara militer dengan gerakan reformasi di kota ini yang naik-turun.

Bab IV membahas mengenai dampak gerakan reformasi di Ujung Pandang, dalam hal ini memperlihatkan bagaimana Ujung Pandang dalam kemelut reformasi 1998 dan setelah memasuki masa reformasi, di mana isu-isu lokal hadir disuarakan oleh para demonstran.

Bab V sebagai penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang akan menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM GERAKAN MAHASISWA UJUNG PANDANG DEKADE 1990-AN

Ujung Pandang termasuk kota yang menjadi sentra gerakan mahasiswa di Indonesia, sebab kota ini merupakan salah satu kota tujuan pendidikan. Kota Ujung Pandang memiliki kampus-kampus negeri dan swasta dengan populasi mahasiswa yang cukup besar. Populasi mahasiswa yang melimpah ini memiliki pengaruh terhadap intensitas pergerakan yang dibangun oleh mahasiswa dalam menyikapi persoalan-persoalan negeri. Lantas, pergerakan mahasiswa di Ujung Pandang menjadi simbol kekuatan mahasiswa di Kawasan Timur Indonesia.

Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di Ujung Pandang sebagian besar diwarnai dengan aksi-aksi seperti mimbar bebas, memblokir jalan raya, dan pembakaran ban bekas. Aksi-aksi itu berujung pada penumpukan kendaraan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Dalam pandangan rezim Orde Baru, hal-hal tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional. Kondisi ini membuat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai komponen utama Orde Baru bergerak untuk membuka blokade jalan dan membubarkan aksi mahasiswa. Hal demikian membuka kesempatan terjadinya bentrokan antara ABRI dan mahasiswa.

Aksi yang berujung kekerasan dan kerusakan yang terjadi di Ujung Pandang, hampir semuanya bertolak dari unjuk rasa yang diadakan oleh mahasiswa. Unjuk rasa besar yang hingga kini tak dapat dilupakan masyarakat Ujung Pandang adalah kasus demonstrasi anti helm yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 1987.¹⁰ Unjuk rasa yang digerakkan oleh mahasiswa ini tercatat sebagai gerakan mahasiswa pertama yang berani menentang kebijakan pemerintah secara terbuka, pertama sejak politik mahasiswa dihancurkan pada 1978.

¹⁰Sukriansyah S. Latif dan Tomi Lebang. *Amuk Makassar*. (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi), 1998, hlm. 105-109.

Keluarnya kebijakan nasional oleh Kementerian Perhubungan mengenai pemakaian helm untuk kendaraan bermotor memantik reaksi masyarakat.¹¹ Peraturan tersebut dianggap akan menghilangkan nilai adat ketimuran yang selama ini dianut oleh masyarakat. Meski tujuan pelaksanaan aturan tersebut demi keselamatan pemakai kendaraan itu sendiri, kebijakan ini cukup banyak mendapat tentangan. Tidak sedikit masyarakat Ujung Pandang yang enggan mematuhi aturan tersebut. Protes mahasiswa itu akhirnya harus dibayar mahal, lantaran sampai harus mengorbankan empat nyawa mahasiswa: Taqwa, mahasiswa FMIPA IKIP; Zainuddin, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra IKIP; Andi Chandra Wiguna, mahasiswa Fisipol UVRI; dan Anzar mahasiswa IKIP.¹²

A. Organisasi Intra dan Ekstra Universitas di Ujung Pandang

Peristiwa kerusuhan besar akibat demonstrasi mahasiswa Ujung Pandang menolak aturan penggunaan helm tahun 1987 menjadi sesuatu yang heboh secara nasional. Kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana mahasiswa di Ujung Pandang dalam menyikapi isu-isu nasional. Gerakan mahasiswa di Ujung Pandang pada dekade berikutnya kemudian mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan struktur organisasi maupun arah perjuangan.

Organisasi mahasiswa hadir dalam dua kategori, yaitu organisasi intra universitas dan yang kedua adalah organisasi ekstra universitas. Organisasi intra universitas merupakan organisasi mahasiswa yang berkedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi dan mendapatkan pendanaan resmi dari pengelola perguruan tinggi. Salah dua organisasi mahasiswa intra universitas adalah Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) dan organisasi pers mahasiswa.

Organisasi mahasiswa ekstra universitas adalah organisasi yang berdiri di luar wewenang pengelola perguruan tinggi, sehingga organisasi ekstra universitas tidak berada pada struktur badan kemahasiswaan yang diakui oleh perguruan tinggi. Organisasi ekstra universitas pada umumnya dipengaruhi oleh kesamaan

¹¹Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 188/AJ. 403/PHB-1986.

¹²Sukriansyah S. Latif, *Op. Cit.*, hlm. 109.

pandangan atas paham maupun ideologi tertentu. Organisasi mahasiswa ekstra universitas yang dominan pada saat itu adalah organisasi ekstra yang berpaham keagamaan, yaitu agama Islam, di antaranya ada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Selain itu terdapat juga organisasi ekstra universitas yang berhaluan nasionalis, misalnya Serikat Mahasiswa Makassar (SMM).

1. Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) – Organisasi Intra Universitas

Pertengahan dekade 1990-an, hampir semua kampus di Ujung Pandang kembali menghidupkan lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas. Hal ini merupakan bentuk tindak lanjut dari keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/U/1990. Pokok dan tujuan dari keputusan menteri tersebut adalah untuk dibentuknya kembali lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dengan nama Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT).

Pada tataran fakultas dibentuk pula Senat Mahasiswa Fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan Majelis Perwakilan Mahasiswa (Maperwa). Pada tingkat jurusan terbentuk pula Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Selain lembaga eksekutif dan legislatif mahasiswa baik di tingkat universitas maupun fakultas, juga hadir Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terbentuk berdasarkan minat, bakat, dan penalaran keilmuan. Seluruh lembaga yang disebutkan merupakan organisasi intra universitas yang memiliki kedudukan resmi dalam sebuah perguruan tinggi dan mendapatkan pendanaan resmi dari pengelola universitas.

Tahun 1994 di Universitas Hasanuddin berhasil terselenggara Pemilu Raya Mahasiswa Unhas. Pesta demokrasi kampus ini dilakukan untuk membangun kekuatan mahasiswa di tataran universitas. Mula-mulanya dilakukan dengan membentuk lembaga legislasi mahasiswa, yaitu Maperwa. Maperwa mempunyai tanggung jawab sebagai lembaga yang bakal melaksanakan pemilu raya. Pembentukan Maperwa berhasil dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 1994 di daerah dataran tinggi Malino, Kabupaten Gowa dalam Sidang Umum Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Setelah Maperwa terbentuk, proses menuju

pemilu raya akhirnya berlangsung, dengan lebih dahulu terselenggaranya sidang pleno Maperwa. Pada sidang pleno ke-II Maperwa mengesahkan empat calon Ketua SMUH, yakni Salahuddin Alam (mahasiswa Fakultas Sastra), Thamrin Halide (mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi), Abdul Rahman dan A. M. Irwan Pattawari (mahasiswa Fakultas MIPA). Pemilu Raya Mahasiswa Unhas akhirnya terselenggara pada tanggal 31 Maret 1994. Thamrin Halide, mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi unggul dari para pesaingnya dan keluar sebagai Ketua Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin periode 1994-1995.¹³

Gambar 2.1.

Keterangan: Senat Mahasiswa Universitas Hasanuddin (SMUH).



Sumber: PK Identitas Unhas edisi, Senin 13 April 1998.

Namun, eksistensi SMPT sebagai kekuatan mahasiswa di tingkat universitas tidak berlangsung efektif dalam membangkitkan gerakan mahasiswa Unhas. Salah satu faktornya adalah ketidaksamaan dan ketidakcocokan yang fundamental dari lembaga-lembaga di tingkatan fakultas. Tiap-tiap fakultas memiliki berbagai latar belakang bidang pendidikan serta karakter kepribadian yang berbeda-beda.

¹³Ostaf Al Mustafa (Mahasiswa Komunikasi Unhas 1988 & Aktivistis AMPD serta HMI), wawancara dilakukan via daring dengan menggunakan *zoom*, tanggal 11 Agustus 2023.

Kemudian kedudukan SMPT sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas, ternyata tidak menjadikan lembaga ini semakin kuat dalam membangun aksi dan gerakan. Mereka lebih cenderung sebagai kelompok eksklusif dan elitis, serta tidak peka dengan kondisi sosial dan politik pada saat itu.

Salah satu faktor sehingga senat universitas bersikap demikian adalah masih melekatnya peninggalan sejarah intervensi rezim berupa kebijakan NKK/BKK yang diperkenalkan pada tahun 1978, walaupun pada pertengahan tahun 1990-an itu kebijakan NKK/BKK sudah tidak ada.¹⁴ Hal tersebut berdampak pada kontribusi SMPT yang begitu kecil terhadap pergerakan mahasiswa. Ruang-ruang yang diberikan tidak ada kaitannya dengan perlawanan pergerakan mahasiswa. Kegiatan-kegiatan semacam baksos, seminar, atau diskusi mengenai pembangunan lebih banyak mewarnai aktivitas lembaga tersebut. Hal-hal tersebut membuat organisasi ini tertutup dari dinamika-dinamika seperti gerakan pro-demokrasi atau perlawanan terhadap pelanggaran HAM.

Periode kepemimpinan Thamrin Halide merupakan periode pertama dan terakhir kehadiran SMPT di Universitas Hasanuddin. Perbedaan sikap, karakter, dan pemikiran pada tataran lembaga tingkat fakultas telah menimbulkan konflik yang melemahkan SMPT. SMPT di Universitas Hasanuddin akhirnya kembali harus vakum setelah terjadi peristiwa pengrusakan kotak suara oleh mahasiswa Fakultas Teknik pada saat Pemilu Raya Mahasiswa Unhas kembali dilaksanakan

¹⁴Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) merupakan kebijakan dari Kementerian P & K yang dipimpin oleh Daoed Joesof pada tahun 1978 untuk meredam suara-suara yang mencoba mengkritisi pemerintah, dalam hal ini mahasiswa. Kebijakan ini secara tegas melarang mahasiswa untuk terjun dalam politik praktis. Baca Amran Razak. *Demonstran Dari Lorong Kambing* (Jakarta: Kakilangit Kencana), 2015, hlm. 105.

pada tahun 1995. Mahasiswa Fakultas Teknik Unhas mengambil sikap untuk tidak mengambil bagian dalam Pemilu Raya.¹⁵

2. Organisasi Pers Mahasiswa – Organisasi Intra Universitas

Kegagalan senat universitas di kampus Unhas dalam menampung dan menjadi lembaga yang mengakomodir aspirasi gerakan mahasiswa menjadi cerminan dari bagaimana situasi dan keadaan SMPT pada perguruan-perguruan tinggi lainnya di Ujung Pandang. Aktivistis mahasiswa kemudian beralih mencari wadah baru dalam memuaskan gejolak kritisismenya dalam organisasi pers mahasiswa. Pers mahasiswa menjadi organisasi alternatif pada masa tersebut, kelompok pers mahasiswa menjadi tempat perlawanan baru yang amat dominan dalam gerakan mahasiswa. Sejalan dengan hal tersebut, pers mahasiswa tumbuh dan berkembang secara pesat, kelompok ini mampu menghasilkan tulisan kritis dalam bentuk kolom, opini, berita, dan juga turun dalam melakukan demonstrasi di jalanan serta pendampingan kepada masyarakat atau advokasi.

Kelompok pers mahasiswa bertransformasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan perubahan sosial. Pers mahasiswa menguatkan gerakan mahasiswa dengan menerbitkan media yang tanpa tedeng aling-aling melawan rezim Soeharto. Di masa itu kelompok pers mahasiswa menjadi tempat bertemunya para aktivis mahasiswa dari lintas jurusan, fakultas, universitas, hingga organisasi eksternal kampus semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi pers mahasiswa tidak hanya aktif dalam ranah jurnalistik saja, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

Tanggal 9 Februari 1995 di Universitas Hasanuddin terbentuk organisasi pers mahasiswa dengan nama Unit Kegiatan Pers Mahasiswa Unhas (UKPM) yang memiliki pengaruh besar melalui opini-opini di pemberitaannya. UKPM adalah rumah dari banyak aktivis gerakan dan aktivis pers mahasiswa untuk berdiskusi dan menjadi tempat mereka menyusun rencana dan strategi untuk aksi. Hal ini

¹⁵Maqbul Halim (Mahasiswa Komunikasi Unhas 1992 & Aktivistis Pers Mahasiswa), wawancara bertempat di Cafe Kopizone Makassar, tanggal 3 Agustus 2023.

membuat terjadinya suatu hubungan antara aktivis pers mahasiswa dengan aktivis gerakan mahasiswa yang amat kuat dalam satu komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi Soeharto dan Orde Baru. Salah satu terbitan dari UKPM Unhas adalah *Catatan Kaki*. *Catatan Kaki* pertama kali terbit pada tahun 1996. Periode tersebut merupakan masa akhir dari kepengurusan Nasrul Tanjung yang memimpin pada tahun 1995-1996. Nama *Catatan Kaki* diusulkan oleh dua orang yaitu Nasrul Tanjung dan Agung Yusuf, Ketua Umum Periode 1996-1997. Pengelola atau kru redaksi *Catatan Kaki* diharapkan untuk menuliskan isu-isu yang bagi pers umum dianggap tak penting. Aktivis *Catatan Kaki* menganggap pers umum tidak memberi ruang untuk berita-berita kritis terhadap penyelewengan Orde Baru.¹⁶

Gerakan menjadikan organisasi pers mahasiswa sebagai wadah menghimpun kekuatan tidak hanya terjadi di Unhas, akan tetapi terjadi juga di kampus lain yang terletak di Jalan Urip Sumohardjo, Kampus Hijau, sebutan lain dari Universitas Muslim Indonesia (UMI) juga berlangsung hal demikian. Di UMI terdapat organisasi pers mahasiswa yang memiliki peranan pada gerakan-gerakan mahasiswa di masa Orde Baru. Organisasi tersebut bernama Unit Penerbitan dan Penulisan Mahasiswa (UPPM). Berdiri sejak 23 Juni 1993, pada awalnya UPPM memilih fokus pada penerbitan dan penulisan dengan menerbitkan surat kabar mahasiswa yang diberi nama *Cakrawala Ide*. Akan tetapi, setelah itu UPPM UMI mengalami perubahan orientasi dengan membentuk sebuah departemen Forum Studi Isu Strategis (FOSIS) sebagai wadah advokasi.

Cakrawala Ide dan Fosis adalah dua paket saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Proses melengkapi itu semakin terang terlihat dalam aktualisasi sebuah isu yang sedang ramai baik di internal maupun eksternal kampus. Fosis mengupas habis isu dalam forum diskusi dengan menghadirkan pakar sebagai pemateri dan seluruh anggota UPPM sebagai pendengar. Setelah proses diskusi

¹⁶Hasbi Lodang (Mahasiswa Sastra Asia Barat Unhas 1993 & Aktivis AMPD serta UKPM), wawancara bertempat di rumah makan Dinghao, tanggal 28 September 2023.

biasanya akan diakhiri dengan mencari kesepakatan. Hasil diskusi akan berujung pada demonstrasi yang digerakkan oleh Fosis dan diterbitkan di *Cakrawala Ide*.¹⁷

3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) – Organisasi Ekstra Universitas

Tahun 1985 rezim Orde Baru mengesahkan Undang-Undang No. 8 tahun 1985 yang isinya mewajibkan semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, dampak dari hal tersebut adalah banyak organisasi yang terpecah, karena ada faksi dalam organisasi yang menerima dan ada yang menolak, organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) termasuk dalam kelompok itu. Pelaksanaan aturan ini kemudian memicu perpecahan internal dalam tubuh organisasi HMI. Perpecahan ini membuat HMI yang sejak awal berasaskan Islam terbelah menjadi dua kelompok, ada yang mempertahankan asas Islam dan ada kubu yang mengubah asas Islam menjadi Pancasila. HMI yang mempertahankan asas Islam menamakan diri sebagai HMI Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), sedangkan kelompok yang merubah asas organisasi menjadi Pancasila dikenal dengan nama HMI Diponegoro (HMI Dipo).

HMI adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Kota Ujung Pandang. HMI memiliki satu cabang di kota ini yang beralamat di Jalan Bontolempangan, dikenal dengan nama Wisma HMI. Wisma HMI merupakan tempat utama dari segala aktivitas pengurus HMI cabang Ujung Pandang. Akan tetapi HMI tidak hanya sebatas memiliki cabang di Ujung Pandang saja, mereka juga melakukan penetrasi pada tiap-tiap kampus dengan membentuk komisariat-komisariat. Tidak mengherankan jika organisasi eksternal kampus ini memiliki basis mahasiswa yang tersebar di hampir seluruh kampus yang ada di Ujung Pandang.

Periode tahun 1994-1998, terjadi kemerosotan pada kekuatan gerakan HMI di Ujung Pandang. Lemahnya kekuatan gerakan HMI disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah perpecahan internal dalam tubuh organisasi, yaitu organisasi terbelah dalam dua kelompok yaitu HMI Dipo dan HMI MPO. Faktor

¹⁷Rasmi Ridjang Sikati. *Mencari Jejak AMARAH*. (Makassar: Link Pena), 2007, hlm. 16-17.

kedua adalah ikut terlibatnya alumni HMI dalam struktur pemerintahan. Hal ini amat berdampak pada HMI karena begitu dekat dengan kekuasaan dan membuat periode tersebut menjadi periode lesunya pergerakan HMI. HMI lebih fokus membangun kekuatan di struktur mahasiswa yang ada pada internal kampus. Mereka hanya aktif melakukan *basic training* (Bastra) sebagai proses kaderisasi untuk menambah basis massanya. Hampir dapat dipastikan hal itu terjadi lantaran pada masa-masa tersebut banyak alumnus HMI menempati posisi-posisi strategis dalam birokrasi pemerintahan.

Satu kasus yang dapat dijadikan contoh adalah Nurdin Halid. Nurdin Halid merupakan salah satu alumni HMI yang menjadi bagian dari rezim Orde Baru. Nurdin Halid diangkat menjadi Direktur Utama Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Hasanuddin, Sulawesi Selatan (1992-1998). Pada saat diberlakukannya aturan kartel cengkih yang mengharuskan petani cengkih di Sulsel menjual cengkihnya ke Puskud Hasanuddin, terjadi penolakan karena aturan ini dianggap merugikan petani cengkih, Puskud selaku pemegang hak monopoli perdagangan cengkih dapat melakukan pengaturan harga. Akan tetapi suara dari HMI hampir-hampir tidak terdengar karena tenggelam dalam keriuhan suara yang didengungkan oleh elemen-elemen lain.¹⁸ Meskipun HMI kerap berkoordinasi dengan spektrum gerakan mahasiswa lain, seperti organisasi mahasiswa intra universitas, akan tetapi HMI tidak lagi menjadi organisasi yang keras dan radikal, HMI terlihat jarang sekali melakukan penyikapan terhadap isu dan fenomena sosial yang timpang termasuk dalam bentuk aksi-aksi atau yang lain.¹⁹

¹⁸Ostaf Al Mustafa (Mahasiswa Komunikasi Unhas 1988 & Aktivistis AMPD serta HMI), wawancara dilakukan via daring dengan menggunakan *zoom*, tanggal 11 Agustus 2023.

¹⁹Dahlan Usman (Mahasiswa FE Unhas 1993 & Aktivistis HMI), wawancara berlangsung secara daring via *zoom*, tanggal 5 Maret 2023.

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) – Organisasi Ekstra Universitas

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menjadi organisasi eksternal kampus yang dikenal dan terpandang di Ujung Pandang. Organisasi ini merupakan sayap dari organisasi keagamaan Nahdatul Ulama (NU). Keberadaan NU sebagai organisasi keagamaan kemudian melahirkan organisasi baru dalam dunia kemahasiswaan lewat lahirnya PMII. Latar belakang dari lahirnya organisasi ini bertolak pada tahun 1960, adanya tuntutan sejarah perkembangan mahasiswa Nahdliyin (sebutan untuk warga NU). Berdirinya PMII semata-mata karena momentumnya telah tiba dan kepentingan yang sangat mendesak untuk mengurus Nahdliyin, khususnya untuk para mahasiswa Nahdliyin agar mampu berdiri di atas kaki sendiri. Membangun suatu gerakan mahasiswa yang lebih dapat dipercaya untuk menjadi alat revolusi, yang di mana kelompok ini lahir sewaktu Sukarno menjadi penguasa dengan ide-ide dan slogan revolusinya. PMII Lahir untuk menjawab kebutuhan dari mahasiswa Nahdliyin untuk menyalurkan aspirasinya.

PMII merupakan organisasi mahasiswa Islam yang memiliki jaringan dan struktur di berbagai universitas di Ujung Pandang. Perbedaannya dengan HMI dapat dilihat dari kuantitas kader yang di mana PMII tidak sebanyak kader HMI, akan tetapi kader organisasi ini juga tersebar cukup merata di beberapa perguruan tinggi. Saat kelahirannya di masa Demokrasi Terpimpin, salah satu dari tiga belas pendiri organisasi ini berasal dari Makassar, mahasiswa tersebut bernama Ahmad Husain.²⁰ Sejak saat itu pula jaringan PMII di Makassar mulai terbentuk, sehingga tidak mengherankan jika strukturnya tersebar merata di setiap kampus.

PMII Ujung Pandang memiliki sikap dan karakter khas sebagai organisasi mahasiswa Islam. Mereka tidak henti-hentinya mengadopsi pola pergerakan jalanan yang dilakukan organisasi mahasiswa lainnya. Kader-kader PMII lebih

²⁰NU *Online*. 2016. “Sejarah Lahirnya PMII” (<https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-lahirnya-pmii-q8TLb>, diakses 22 Agustus 2023).

aktif melakukan kajian-kajian atau diskusi untuk membahas isu strategis. Metode perjuangan melalui tulisan lebih ditekankan dalam setiap kader PMII Ujung Pandang. Di samping itu mereka juga kerap melakukan aksi jalanan yang terorganisir.

5. Serikat Mahasiswa Makassar (SMM) – Organisasi Ekstra Universitas

Organisasi ekstra universitas di Ujung Pandang tidak hanya yang berhaluan agama, terdapat juga organisasi ekstra kampus yang berhaluan nasionalis. Di Ujung Pandang muncul organisasi mahasiswa yang berafiliasi dengan partai yang menjadi musuh Orde Baru, Partai Rakyat Demokratik (PRD). Kelompok itu bernama Serikat Mahasiswa Makassar (SMM) yang terbentuk pada tahun 1997. SMM sendiri merupakan kamufase dari Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Ujung Pandang.

PRD dengan organisasi *onderbouw* Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) tengah menjadi target pemerintah Orde Baru. Aktivis PRD banyak yang diburu, ditangkap, dan dijebloskan ke penjara setelah terjadi peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli di tahun 1996.²¹ Kondisi ini membuat jaringan PRD di seluruh daerah menggunakan nama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa pada saat itu PRD di Ujung Pandang menggunakan nama SMM. Organisasi ini dibangun Muhammad Abduh Bakry Pabe (mahasiswa Teknik Industri UMI), Abduh merupakan aktivis PRD yang membangun PRD di Sulawesi Selatan.

SMM aktif memberikan pendidikan politik bagi kaum buruh, mengadvokasi kasus petani, dan mendampingi kasus sengketa lahan khususnya pada kaum miskin perkotaan di Ujung Pandang. Secara kuantitas jumlah anggota organisasi ini tidak terlalu banyak, akan tetapi cukup diperhitungkan oleh penguasa pada saat itu. Organisasi ini cukup radikal dalam membangun jaringan terutama dengan gerakan pro-demokrasi di Ujung Pandang, sehingga pernah terbentuk organisasi perjuangan bernama Pendukung Setia Megawati (PSM).

²¹Teddy Wibisana, *Op. Cit.*, hlm. 228-236.

SMM bermetamorfosis menjadi PRD Sulsel setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenannya. Pada masa transisi kepemimpinan nasional, PRD terus memperjuangkan tegaknya demokrasi di Indonesia. Tahun 1999 ketika wacana referendum untuk Timor-Timur semakin menguat, PRD kembali menunjukkan konsistensinya dengan mendukung referendum. Dukungan tersebut membuat represifitas aparat terhadap PRD Ujung Pandang kembali terjadi.

B. Kelompok Diskusi Mahasiswa Ujung Pandang

Ketidakpuasan terhadap organisasi intra kampus, khususnya Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) yang kurang mampu mewadahi aspirasi gerakan mahasiswa atau ketidakpekaan mereka terhadap isu atau fenomena sosial-politik, serta organisasi eksternal kampus semacam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dinilai begitu dekat dengan rezim, melahirkan inisiatif mahasiswa untuk membuat peta jalur pergerakan baru. Perlu diketahui bahwa sejak akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an, sebuah gelombang baru demonstrasi mahasiswa dimulai. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan tema lazim bagi gerakan protes mahasiswa.²²

Semangat zaman demikian kemudian mendorong kelompok diskusi kritis serta organisasi pers mahasiswa menjadi elemen-elemen kekuatan baru yang timbul akibat kemandulan gerakan pada masa itu. Beberapa mahasiswa di Ujung Pandang mulai membangun kekuatan-kekuatan yang tidak terikat dan lepas dari pengaruh-pengaruh yang dinilai tidak mampu menampung hasrat pergerakan mereka.

Kelompok forum-forum diskusi mulai terbentuk di kampus Universitas Hasanuddin. Kemudian forum ini berkembang menjadi kelompok gerakan, walaupun kekuatan-kekutan pergerakannya masih di dalam sekop-sekop kampus. Satu dampak berikutnya yang lahir dari fenomena forum-forum diskusi ini adalah terbentuknya kelompok non-struktural dan tidak formal yang militan dan radikal.

²²Anders Uhlin. *Oposisi Berserak (Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia)*, (Bandung: Mizan), 1998, hlm. 108.

Aliansi ini tidak terikat pada kekakuan kelompok-kelompok semacam senat perguruan tinggi atau yang lainnya, akan tetapi pergerakan mereka diperhitungkan secara luas, sebab tidak hanya bereaksi dan menggemparkan Ujung Pandang, pemerintah pusat di Jakarta juga kelimpungan menghadapi militansi aliansi dari daerah ini.

1. Kelompok Diskusi

Awal dekade 1990-an di Universitas Hasanuddin sedang giat dilakukan aktivitas dalam suatu perkumpulan yang disukai oleh sebagian mahasiswa, yaitu kelompok diskusi. Pada hari-hari tertentu, mahasiswa berkumpul untuk melakukan diskusi, baik formal maupun informal. Kegiatan ini tentu saja amat bagus, sebab mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas, ketimbang yang didapatkan di bangku kuliah, yang terbatas dan kadang-kadang tumpul, sebab jarang sekali ada dosen yang bersikap kritis dengan teori-teori yang mereka kuasai. Dosen yang seharusnya melakukan kritik kepada negara malah menjadi diam ataupun mereka takut. Hal seperti ini yang diambil alih oleh kelompok diskusi, di kelompok diskusi mahasiswa bisa mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan di bangku kuliah.

Kegiatan diskusi semacam ini tidak menetap, entah itu ke himpunan atau lintas fakultas. Keputusan teknis tersebut bergantung pada siapa yang menjadi penyelenggara untuk menyiapkan tempat, fasilitas, dan sebagainya. Akan tetapi, mahasiswa terkadang selektif dalam memilih tempat untuk mengadakan diskusi, karena pada saat itu ada istilah “Tembok pun punya telinga.”

Kegiatan diskusi yang diadakan pada malam hari disebut dengan istilah Senat Malam. Kegiatan diskusi malam semacam itulah yang amat penting dalam mengelola pemikiran pada saat itu. Kalau diskusi pada malam hari, mahasiswa mampu mengkritik siapa saja, karena yang ikut diskusi ini adalah orang-orang

yang pasti dikenal, yang tidak mungkin membocorkan isi diskusi. Bukan hanya diskusi bedah buku, tapi juga diskusi mengenai kasus per kasus di masyarakat.²³

Ada beberapa kelompok mahasiswa yang aktif pada gerakan-gerakan di Ujung Pandang, misalnya Forum Diskusi Tamalanrea (FDT) yang dibentuk oleh Salahuddin Alam (mahasiswa Fakultas Sastra Unhas angkatan 1987) pada tanggal 2 Mei 1991. FDT lahir sebagai respon tandingan atas terbentuknya SMPT yang merupakan keputusan Menteri P & K. FDT merupakan kelompok alternatif pemuda khususnya mahasiswa yang gerakannya tidak terwadahi oleh lembaga kemahasiswaan intra dan ekstra kampus. FDT rutin mengadakan diskusi seusai Solat Jumat di pelataran Masjid Kampus Unhas. Diskusi FDT sering mengambil tempat di pelataran Masjid Kampus Unhas bukan karena tanpa alasan, akan tetapi pada saat diskusi sedang gencar dilakukan, pembangunan masjid kampus di awal 1990-an itu masih mangkrak, jadi agar masjid cepat dibangun kembali, FDT intens mengadakan diskusi sebagai sindiran kepada rektorat yang tidak menyelesaikan pembangunan masjid.²⁴

Front Demonstran Tuanta Salamaka (FDTS) juga menjadi kelompok diskusi mahasiswa yang aktif melakukan kajian dan aksi. Pendirian FDTS adalah salah satu upaya untuk menguatkan kekuatan FDT di tingkatan aksi dan advokasi non-litigasi. FDTS didirikan oleh Izraidi Zainal, mahasiswa Unhas angkatan 1988. Salah satu aksi FDTS ketika mereka turun langsung menginvestigasi kebakaran di Kerung-Kerung yang dicurigai dilakukan oleh Pemda Ujung Pandang pada awal Agustus tahun 1994.²⁵

²³Akbar Endra (Mahasiswa Sastra Daerah Unhas 1992 & Aktivis AMPD), wawancara berlangsung di kediaman beliau di Kabupaten Maros, tanggal 30 Juli 2023.

²⁴Ostaf Al Mustafa (Mahasiswa Komunikasi Unhas 1988 & Aktivis AMPD serta HMI), wawancara dilakukan via daring dengan menggunakan *zoom*, tanggal 11 Agustus 2023.

²⁵*Pedoman Rakyat*, 7 Agustus 1994, “Korban Kebakaran Menangis di Gedung DPRD KMUP *FDTS Sampaikan Memorandum.”

Forum Kajian Strategis Karaeng Pattingaloang (FKSKP) juga terbentuk pada bulan April 1994. FKSKP diketuai oleh Andi Wahyuddin Djalil, mahasiswa Fakultas Hukum Unhas angkatan 1991. FKSKP diproyeksikan sebagai dapur ilmiah mahasiswa untuk pengabdian masyarakat, pro-aktif terhadap masalah-masalah budaya, demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Selain itu ada kelompok Solidaritas Dilarang Takut, Partai Demokrasi Mahasiswa Unhas (PADAMU), dan YAS-ABG (Yayasan Estetik Aliansi Bebas Gugatan) yang salah satu pentolannya adalah Ostaf Al Mustafa, mahasiswa Komunikasi Unhas 1988.²⁶ Kelompok-kelompok diskusi ini makin eksis saat Pemilu Raya Mahasiswa Unhas diselenggarakan di pertengahan tahun 1990-an, masing-masing mengusungkan calon ketua.

2. Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD)

Kemunculan, pengerasan, dan penguatan gerakan sosial biasanya digambarkan melalui bangkitnya “kelas menengah politik”, yakni anggota komunitas terdidik di perkotaan yang menjadikan kritisisme sebagai basis politik mereka. Mereka membangun daya tawarnya melalui intelektualitas dan organisasi politik. Mereka membawa wacana yang sangat beragam dan mengagendakan demokratisasi sebagai target gerakan. Aliansi Mahasiswa Pro-Demokrasi (AMPD) di Ujung Pandang adalah satu contoh perkumpulan manusia-manusia terdidik perkotaan yang dijelaskan ini.²⁷

Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok diskusi di kampus Unhas melahirkan satu dampak terhadap terciptanya aliansi mahasiswa yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Kelompok-kelompok diskusi ini, terkhususnya Forum Diskusi Tamalanrea (FDT) menjadi bibit sehingga lahir

²⁶Maqbul Halim (Mahasiswa Komunikasi Unhas 1992 & Aktivist Pers Mahasiswa), wawancara bertempat di Cafe Kopizone Makassar, tanggal 3 Agustus 2023.

²⁷Eep Saefulloh Fatah. *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. XXXI.

kelompok pro demokrasi yang bernama Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi (AMPD).

Pembentukan AMPD dideklarasikan di auditorium kampus IKIP Ujung Pandang pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 1994. Beberapa fungsionaris lembaga lintas kampus turut menandatangani lahirnya aliansi mahasiswa pro-demokrasi ini. Antara lain Isradi Zainal Ketua Maperwa Unhas; Usman Abdullah Ketua SMPT Universitas 45; Faisal Jollong Ketua SMPT IAIN Alauddin; A. Supriadi Ketua SMPT IKIP; Abdul Azis P. Ketua SMPT STIE YPUP; Amiruddin Zakariah Senat Mahasiswa Syariah UMI. Selain itu, AMPD juga didukung kalangan pers mahasiswa Andi Wahyuddin Djalil SKK Identitas Unhas, Muh. Ramal Azis dari SKK Profesi IKIP, serta Zainal Arifin mantan ketua HMI cabang Ujung Pandang.²⁸

AMPD menjadikan mahasiswa sebagai pemeran utama dalam kelompok ini. Kata aliansi yang berarti gabungan dari beberapa lembaga yang memiliki cita-cita dan tujuan yang sama. Kemudian pro-demokrasi menegaskan tujuan kelompok ini untuk memperjuangkan demokrasi yang pada masa Orde Baru mengalami kemerosotan dan pengekanan yang kuat, di mana kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan sebagainya sangat dibatasi dan diawasi oleh rezim. Sebutan pro-demokrasi melalui banyak proses dalam berbagai diskusi yang berpindah-pindah tempat, untuk kemudian mendapatkan kesepakatan bersama menggunakan kata ini sebagai sebuah identitas.

Demokrasi pada rezim Orde Baru merupakan kata yang cenderung berbahaya untuk begitu saja dicetuskan. Demokrasi pada saat Orde Baru seakan menjadi musuh bagi penguasa yang otoriter dan diktator seperti Soeharto, di sisi lain

²⁸*Pedoman Rakyat*, Rabu, 28 Desember 1994, "Terbentuk Aliansi Mahasiswa Prodemokrasi di UP."

penggunaan nama demokrasi harus siap dengan segala kemungkinan intimidasi dan dilumpuhkan oleh penguasa.²⁹

AMPD menganut ideologi pro-demokrasi yang artinya bergerak menuju perubahan, perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju ke arah demokratisasi yang terbebas dari kediktatoran. AMPD merupakan organisasi gerakan yang lebih memilih aturan jalanan dari pada formalitas organisasi baku, tidak seperti organisasi kebanyakan yang memilih struktur organisasi yang jelas. AMPD adalah salah satu organisasi yang tidak berstruktur, jalur organisasinya hanya dipegang oleh satu fungsionaris yaitu koordinator. Koordinator berfungsi untuk mengkonsolidasikan anggota-anggota untuk melakukan diskusi-diskusi kemudian kesepakatan yang dihasilkan dalam diskusi inilah yang akan menjadi acuan gerakan yang akan dibangun.

Sebagai organisasi gerakan, sikap kritis dan militansi jauh lebih penting dibandingkan formalitas struktur. Struktur tidak lagi digunakan karena dianggap hanya sebagai formalitas yang akan menghasilkan sikap elitis di dalam organisasi yang dicemaskan akan memengaruhi kemampuan radikal dan militansi yang hanya sampai di kepitana pena di jari jempol dan telunjuk. Gerakan yang dibangun AMPD terbilang sukses karena diduplikasi oleh organisasi-organisasi lain sebagai inti gerakan nasional, kemudian pada tahun 1998 dijadikan sebagai tuntutan dasar reformasi. Sukses nasional, pencabutan lima paket undang-undang politik, hilangkan korupsi dan kolusi merupakan tuntutan yang telah diperjuangkan AMPD jauh sebelum reformasi bergulir.³⁰

Koordinator AMPD pertama kali dipegang oleh Isradi Zainal, mahasiswa Teknik Perkapalan Unhas angkatan 1988. Kelompok ini menyelenggarakan

²⁹Hasbi Lodang (Mahasiswa Sastra Asia Barat Unhas 1993 & Aktivis AMPD serta UKPM), wawancara bertempat di rumah makan Dinghao, tanggal 28 September 2023.

³⁰Akbar Endra (Mahasiswa Sastra Daerah Unhas 1992 & Aktivis AMPD), wawancara berlangsung di kediaman beliau di Kabupaten Maros, tanggal 30 Juli 2023.

diskusi seminggu sekali untuk membicarakan masalah-masalah politik, demokrasi, hak-hak asasi manusia (HAM). Mula-mula, kegiatan diskusi tersebut hanya sebatas diskusi biasa. AMPD kemudian meningkatkan aktivisme mereka dengan melakukan demonstrasi akibat ketidakpuasan yang mengkrystal sewaktu diskusi. Aksi unjuk rasa yang pertama pun digelar pada peringatan Supersemar tahun 1995. Aksi dilakukan dengan mendatangi kantor DPRD Tk. I Sulawesi Selatan, membawa 10 tuntutan yang disebut Sepultura (Sepuluh Tuntutan Rakyat). Salah satu tuntutan yang diajukan ialah “Bersihkan Orsospol dari unsur PKI.” Akan tetapi, aksi tersebut dan rangkaian kegiatan setelahnya belum membawa implikasi negatif yang serius bagi AMPD.

Akbar Endra, mahasiswa Sastra Daerah Unhas angkatan 1992 kemudian menjadi koordinator baru di AMPD. Pada bulan Oktober 1995, AMPD menggelar aksi menentang kebijaksanaan Gubernur Sulsel H. Zaenal Basri Palaguna, yang menghadiahkan mobil mewah Mitsubishi Pajero—dengan dana yang diambil dari APBD—untuk setiap bupati dan walikota Tk. II di Sulsel. Sejak itu dan bulan-bulan berikutnya para aktivis AMPD seringkali turun ke jalan. Pada bulan April 1996 misalnya, mereka menuntut agar nama Ujung Pandang (yang dimasyarakatkan sejak tahun 1971) dikembalikan ke asalnya, yaitu Makassar. Gara-hara berbagai aktivitasnya itulah, AMPD mengalami teror dan intimidasi dari rezim Orde Baru.³¹

³¹Hermawan Sulisty, et. al. *Kekerasan Politik Dalam Pemilu 1999 Laporan Dari Lima Daerah*. (Jakarta: KIPP Indonesia), 2000, hlm. 50-54.